KAUM BURUH SELURUH INDONESIA, BERSATULAH!

Oleh Nurcholish Madjid

Sistem yang menciptakan kekayaan di tangan orang sedikit dan kemiskinan di tangan orang banyak sudah lama berjalan, dan agaknya masih akan berjalan untuk waktu yang cukup lama lagi. Kamus politik telah menemukan suatu nama umum untuk orang-orang, tanpa perbedaan kebangsaan, warna kulit, jenis kelamin, kepercayaan atau golongan sosial, yang karena tidak mempunyai tanah atau modal, harus menyewakan tenaga atau diri mereka sendiri untuk hidup. Istilah itu ialah "kaum proletar" atau "*proletariat*". Karl Marx (1818-1883) telah dan masih dianggap sebagai kampiun pembela kaum proletar sebagai bagian organis yang sesungguhnya dari suatu masyarakat beradab yang bakal mengalahkan cara pemerintahan dan pemilikan harta yang tidak adil. Sekalipun dilahirkan di Jerman, tetapi Marx menghabiskan lebih dari separuh umurnya di Inggris guna melakukan studi khusus tentang perkembangan kapitalisme di sana (pada waktu itu Inggris adalah negara kapitalis yang paling terkemuka). Dari studi itu, dia sampai pada cita-cita untuk memimpin kaum proletar, agar mereka yang hidup dari menjual atau menyewakan tenaganya itu bersatu padu untuk berjuang menghapuskan pemilikan pribadi atas tanah dan modal kemudian mengambil peranan dalam perjuangan dunia perburuhan internasional. Seruannya yang amat terkenal ialah: "Kaum buruh seluruh dunia, bersatulah!"

Di Indonesia, setelah melalui proses yang tampaknya tidak begitu sulit, telah terjadi hal yang kira-kira sejajar dengan seruan dan cita-cita Marx itu, meskipun hanya dalam ruang lingkup nasional. Dan sudah tentu jika seandainya SOBSI/PKI masih hidup, penyatuan organisasi-organisasi buruh itu akan disambut dengan gegap gempita sebagai suatu tindakan yang revolusioner. Tentu saja inisiatif penyatuan itu harus datang dari pihak mereka, sebab inisiatif yang datang dari pihak lain tidak saja harus dicurigai tetapi kontra-revolusioner!

Suatu segi yang baik dari penyatuan gerakan perburuhan itu ialah dibebaskannya organisasi-organisasi buruh yang ada dari ikatan dengan partai-partai atau badan induk politik. Di mata partai-partai politik, organisasi buruh hanyalah suatu alat, bukan untuk memperjuangkan nasib kaum burah itu sendiri, melainkan untuk mencapai kekuasaan oleh partai. Sedihnya, kepentingan partai-partai itu tidak selamanya sejalan dengan kepentingan kaum buruh, malahan seringkali bertentangan. Sebab, partai-partai itu dipimpin oleh mereka dengan strata sosial yang sulit atau barangkali mustahil memahami aspirasi buruh. Maka adalah suatu ironi bahwa organisasi buruh dibentuk bukannya untuk memperlancar perjuangan mereka tetapi justru memperkuat kedudukan golongan yang dapat dikategorikan "lawan" dunia buruh! Mungkin ada yang keberatan atas pernyataan ini. Tetapi pengamatan secukupnya — tak usah terlalu mendalam — jika disertai dengan sedikit kebebasan atau *impartiality* (sikap tak memihak) tentu akan membawa orang kepada kesimpulan itu.

Pragmatisme Orde Baru — yang meskipun belum tentu setiap orang menyetujui istilah itu tapi *toh* sudah dipraktikkan — adalah non-ideologis. Oleh sebab itu, penilaian ideologis terhadap kehidupan perburuhan di Indonesia tidak dibenarkan. Apalagi dunia itu justru merupakan daerah penggarapan ideologi yang berbeda dengan Pancasila, yaitu Marxisme-Leninisme. Tetapi *toh* orang tidak dapat dicegah untuk senantiasa mempertanyakan: Siapakah sebenarnya buruh itu? Bagaimana kedudukan mereka

dalam sistem masyarakat sekarang? Apa peranan mereka dalam produksi? Bagaimana nasib kemanusiaan mereka? Apa kepentingan mereka yang asasi untuk diperjuangkan? Dan bagaimana caranya serta apa alatnya yang tersedia? Dan dihubungkan dengan proses akhir-akhir ini: Apa tujuan penyatuan organisasi buruh itu dalam rangka pembangunan nasional?

Jawaban mudahnya — karena itu, barangkali, dangkal — ialah: buruh adalah dia yang menjual tenaganya untuk hidup. Dia merupakan *lower class* dalam masyarakat, "alat" produksi yang utama, mendapat bagian yang sedikit dari distribusi, mengalami proses "*dehumanisasi*", merindukan perbaikan nasib, dengan cara menggalang persatuan sesama buruh dan memakai alat mogok sebagai senjata ampuh yang tersedia. Maka kiranya tujuan penyatuan buruh akhir-akhir ini ialah untuk mencapai tujuan perjuangan tersebut dengan menggunakan cara dan alat yang tersedia — jika diizinkan — dalam rangka mewujudkan salah satu segi keadilan sesial sebagai suatu aspek prinsipil dari pembangunan nasional.

Mungkin tinjauan itu terlampau bersifat pesimistis tentang nasib buruh dan masa depannya. Tetapi untuk menjadi optimis hanya dengan mengatakan bahwa perbaikan akan terjadi jika masyarakat atau negara dipimpin oleh orang-orang yang beriktikad baik — jadi tidak perlu meninjau kembali sistem sosialnya dan buruh tidak perlu berjuang sendiri — bagi saya adalah suatu ilusi. Hal itu berlawanan dengan objektivitas mekanisme sosial yang ditimbulkan oleh sistem atau lembaga yang ada. Maka, meskipun setelah penyatuan ini kaum buruh Indonesia mempunyai alat perjuangan yang bisa lebih baik, namun tekniknya masih memerlukan pemikiran lebih jauh. [❖]